



Reformasi Perpajakan Dalam Dinamika Ekonomi Digital



Anisa Falah

Moderator / MC

Mahasiswi Perbanas

Pemberian Materi

Oleh :



**Drs. Edy Soekarno, A.,
MM, CA, CRBF**

Dosen Perbanas

Kaprodi D3 Keuangan
Perbankan Perbanas Institute
Dan Komisaris Independent
Bank BPR di Indonesia



Rizki Yuniarti, SE, MM

Dosen Perbanas

Dosen Perbanas Institute
Pendamping UMKM
Wilayah DKI Jakarta



Nabila Muspita

Mahasiswi Perbanas

Jurusan S1 Akuntansi
Perbanas Institute



Mutiara Nur Dwi S

Mahasiswi Perbanas

Jurusan S1 Akuntansi
Perbanas Institute

Reformasi perpajakan

ialah perubahan sistem perpajakan secara signifikan dan holistik yang meliputi pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi perpajakan, dan peningkatan basis pajak.



Ekonomi digital

ialah seluruh aktivitas ekonomi yang dilakukan dengan memberdayakan jaringan internet dan piranti lunak.

Adaptasi yg cepat di masyarakat & dukungan dari pelaku teknologi, dampaknya akselerasi digital di masyarakat dapat diraih. Kini masyarakat kian paham dgn marketplace, logistik, dan teknologi finansial.

Laporan dari e-Conomy Sea 2021 by Google, Temasek, & Bain & Co

01

Nilai ekonomi digital Indonesia telah mencapai angka 70 miliar dollar AS secara gross merchandise value (GMV) pada 2021. Angka ini telah tumbuh sebesar 75% dari masa prapandemi pada 2019. Pada 2025, Indonesia diproyeksikan mampu meningkatkan GMV hingga 146 miliar dollar AS.

GMV = volume barang dagang kotor – istilah dalam ritel online untuk menunjukkan total nilai moneter penjualan untuk barang dagangan yg dijual via pasar tertentu selama jangka waktu tertentu.

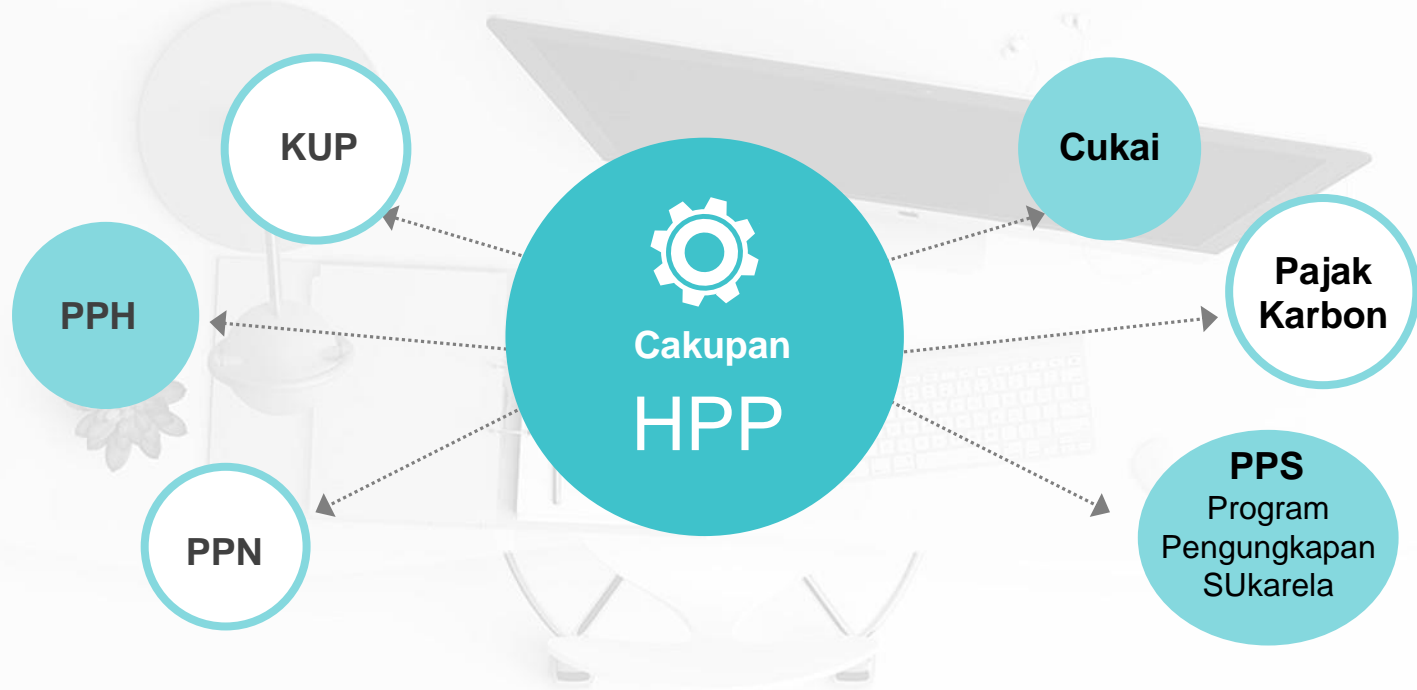
Berdasarkan data Kementerian Koperasi & UKM

02

ada peningkatan hingga 10,2 juta UKM selama pandemi yg memanfaatkan platform digital. Adapun laporan dari perusahaan konsultan Redseer, pembeli daring di Indonesia tumbuh dari 75 juta orang saat prapandemi, menjadi 85 jt orang selama pandemi.

Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)

dibentuk untuk mendorong pemulihan ekonomi nasional (PEN) akibat pandemi Covid 19





01

Perluasan Basis PPN

02

1 April 2022, Besaran PPN = 11%

Per 1 Januari 2025, Besaran PPN = 12%

03

Rata-rata Besaran PPN Dunia = 15,4 %

Filipina = 12%

China = 13%

India = 18%

Pakistan = 17%

Arab Saudi = 15%

Main Issues:

1. Menaikkan tarif pajak akan menimbulkan beban pajak perekonomian
2. Maraknya ritel online bagaimana implikasinya terhadap upaya meningkatkan penerimaan PPN

Hanna, Olken & Basri dalam American Economy Review, 2021

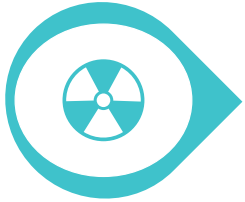


Untuk setiap rupiah kenaikan dalam penerimaan pajak, ada tambahan beban bagi tax payer/WP (marginal excess burden Rp 0,51. Ini “Dead Weight Loss” - biaya yang harus ditanggung oleh perekonomian

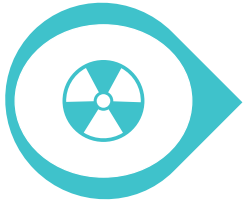
Usulannya: Melakukan Reformasi dalam administrasi perpajakan daripada menaikkan tarif. Misal, memindahkan pelayanan badan usaha dari Kantor Pajak Pratama ke Kantor Pajak Madya.

Keterbatasan apparatus di KPP pratama membuat mereka tendensi memfokuskan diri pada beberapa WP dengan potensi pendapatan yang tinggi.

Kontraproduktif terkait transaksi digital



Robot trading merupakan inovasi dalam perdagangan komoditas berjangka. Ini adalah piranti lunak yang dipasang di computer nasabah yang bekerja dengan rangkaian algoritma untuk mempermudah aktivitas perdagangan valas. Namun publik dibuat bingung karena kehadiran entitas robotic trading abal-abal yang tak punya license.



Direktur Pengendalian Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Antonius Malau), mengetengahkan pihaknya sudah memblokir 3.784 aplikasi daring illegal (Kompas, 22 Februari 2022)

Isu di sini: Regulator keteter merespon kemajuan bisnis berbasis teknologi (IT)

Transformasi Digital vs Fondasi Sosial

Berdasarkan riset Siber Kreasi & Katadata Insight Center, Indeks Literasi Digital Indonesia th 2021 berada pada skor 3,49 / pada tahap sedang & mendekati baik.

Indeks tahun sebelumnya 3,46. Perbaikan terjadi pada pilarbudaya dan keterampilan digital, tetapi pilar etika dan keamanan digital turun (Kompas – Ekonomi Digital, 23 Februari 2022)



Pertumbuhan Ekonomi Digital

tak lepas dari makin bergeliatnya berbagai sektor. Misalnya pertumbuhan E-dagang yang mencapai 52% serta layanan transportasi dan antar makanan yg tumbuh 36% pada 2021. Bagaimana menyikapi fenomena ini ?

Ekosistem know your customer berbasis digital (e-kyc):

1. Perlu dibangun kepercayaan terhadap ekosistem digital dikalangan masyarakat selaku WP – digital trust. Terkait dgn ini perlu akselerasi pembahasan RUU Perlindungan Data Pribadi agar ada payung hukum yg mumpuni di ranah digital
2. Perlu penambahan parameter di luar data KTP utk memastikan kebenaran data pribadi pengguna layanan
3. E-kyc memerlukan ekosistem digital yg kondusif. Dalam konteks ini perlu didorong peningkatan kecekatan digital masyarakat. Ini sejalan dengan salah satu isu prioritas yg diangkat oleh Digital Economy Working Group dalam pergelaran G.20 yakni digital skills & digital literacy



- Dalam RUU HPP integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai pengganti NPWP
- Subjek Pajak Penghasilan > PTKP atau yang punya peredaran bruto Rp500 juta setahun

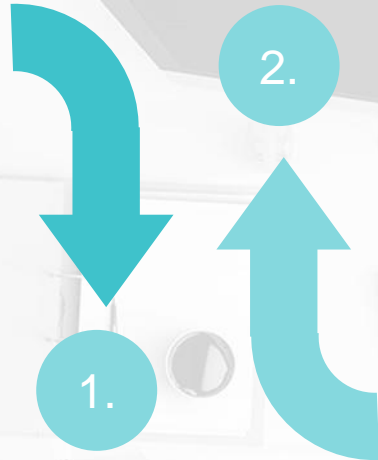


- Dalam HPP diperkenalkan juga Pajak Karbon yg di yakini dapat mendorong perilaku dari kegiatan ekonomi terutama sektor swasta, untuk menginternalisasikan kegiatan ekonomi dalam bentuk emisi karbon dalam hitungan investasinya
- Program Pengungkapan Sukarela (PPS) bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela WP & diwujudkan berdasarkan asas:
 1. kesederhanaan
 2. kepastian hukum*
 3. kemanfaatan.

Penafsiran Peraturan Perundang-undangan Perpajakan

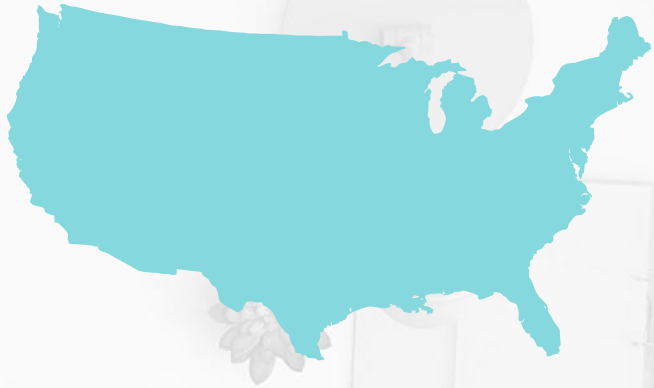
Permasalahan perbedaan judgement atau wording dapat disebabkan oleh dua hal:

Terdapatnya
ketidakselarasan informasi
(Asymmetric information)



Ketidaktepurnaan/
ketidaklengkapan informasi
(Imperfect information) pada
suatu wording dalam suatu kontrak
akibat keterbatasan pikiran manusia
(bounded rationality) dalam
penyusunan kalimatnya serta
perbedaan kepentingan antara pihak
- pihak penafsir dengan perilaku yg
cenderung self-interested


PPS (Program Pengungkapan Sukarela)




Implementasi PPS bisa menemukan potensi adanya keberatan dari Wajib Pajak (WP) atas putusan pajak yang ditetapkan fiskus (Aparat us). Pasalnya, ketetapan pajak pada th 2016 s/d th 2020 dari para WP pribadi peserta PPS tidak akan diterbitkan.




Dengan begitu, PPS akan mengurangi sengketa pajak di Pengadilan.



Peran Regulator diperlukan untuk menyeimbangkan potensi manfaat data sharing dengan keamanan dan perlindungan data pribadi. Di Indonesia, inisiatif pengaturan penguasaan data pribadi (PDP) telah terlihat dalam ketentuan Kominfo, BI dan OJK.



Data milik DJP-Kemenkeu dan BPJS Kesehatan akan diintegrasikan untuk membangun ekosistem program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) – Intruksi Presiden No. 1 Th 2022. Presiden memberikan instruksi khusus bagi 30 Kementerian/lembaga, termasuk Pemda, terkait jalannya program JKN



Menkeu diminta menjaga kesinambungan pendanaan program JKN dan melakukan pemotongan dana alokasi umum dan dana bagi hasil terhadap Pemda yg tidak memenuhi kewajiban program JKN.



Deliberasi publik dan pembukaan kanal—kanal komunikasi antara Pemerintah (Fiskus) dan Civil Society perlu diperbanyak untuk mengurangi tricky liar WP, perlu dikaji kemungkinan institusionalisasi skondan agar mekanisme check and balance berjalan dengan keadaban publik.



Akselerasi data dan informasi yang eksponensial dengan kecepatan dalam pertumbuhannya dan memiliki data besar (mahadata) yang terintegrasi dan akurat di semua kementerian bisa menghemat biaya, waktu, dan tenaga untuk dapat mewujudkan suatu kebijakan yang cepat dan juga tepat





Terima Kasih

**Reformasi Perpajakan Dalam
Dinamika Ekonomi Digital**